



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 236-07-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2019 PROVINSI LAMPUNG**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN**

**JAKARTA,
RABU, 10 JULI 2019**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 236-07-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 Provinsi Lampung

PEMOHON

1. Partai Demokrat (Perkara Nomor 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Perkara Nomor 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
3. Partai Berkarya (Perkara Nomor 236-07-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan

**Rabu, 10 Juli 2019, Pukul 19.00 - 19.53 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Aswanto | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

**Fenny T. Purnamasari
Andriani W. Novitasari**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Yandri Sudarso
2. Pangihutan Blasius Haloho

B. Pemohon Perkara Nomor 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Bob Hasan

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Hendarsam Marantoko
2. Mirzalie
3. M. Fahreza

D. Termohon:

1. M. Lutfi Siasa
2. M. Tio Aliansyah

E. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 236-07-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Budi Rahman
2. Bagas Irawanputra

F. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Taufik Hidayat

G. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Sutikno

H. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Zainal Rahman
2. Herwanto

I. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Paskaria Tombi
2. Tanda Perdamaian Nasution
3. Farida

J. Bawaslu:

1. Fatih Hatul Khoiriah
2. Tamri Suhaimi
3. Iskardo P. Panggar
4. Bella Oktaviani
5. Fritz Edward Siregar

SIDANG DIBUKA PUKUL 19.00 WIB

1. KETUA: ASWANTO

Sidang dalam Perkara Nomor 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Demokrat, Perkara Nomor 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Gerakan ... oh, ini tadi ... Partai Gerakan Indonesia Raya, tadi apa itu? Yang di ... betul ya partai ... Partai Gerakan Indonesia Raya, ya? Gerindra, ya? Kemudian, Perkara Nomor 236-07-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Berkarya.

Dipersilakan untuk Perkara Nomor 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, siapa yang hadir? Silakan perkenalkan diri! Belum hadir, Nomor 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Sebentar ini ... ini Pihak Terkait. Nomor 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 berarti belum hadir, ya? Kemudian Perkara Nomor 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Partai Gerindra. Silakan!

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDARSAM MARANTOKO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Perke ... perkenalkan kami dari Advokasi DPP Partai Gerindra. Saya sendiri Hendarsam Marantoko, S.H., di sebelah kiri saya rekan Mirzalie, S.H., di sebelah kanan saya Prinsipal, Pak Bob Hasan. Ini saja, Yang Mulia, dari kita. Terima kasih.

3. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Pak ... Perkara Nomor 236-07-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 juga belum hadir, ya? Baik.

KPU silakan memperkenalkan diri siapa?

4. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 236-07-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BUDI RAHMAN

Bismillahirrahmaanirrahiim (...)

5. KETUA: ASWANTO

Oh, sori ... sori ... sori. Ini kita belum ini ... kita belum ... belum ketuk palu dibuka, ya? Ini karena mulai ... mulai apa ... bangunnya mulai pukul 03.00 WIB sampai sekarang belum pada tidur.

Baik, untuk Perkara Nomor 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Perkara 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Perkara 236-07-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 1X

Tadi kita ndak usah ulang ... apa namanya ... eh, ini.

KETUK PALU 2X

Semakin malam semakin ... baik. KPU silakan!

6. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 236-07-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BUDI RAHMAN

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Perkara 236-07-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Berkarya. Hadir bersama kami Komisioner KPU Provinsi Lampung, Divisi Hukum, Bapak Lutfi Siasa. Kemudian dari ... apa ... Divisi Hukum Provinsi Lampung, Bapak Tio Aliansyah. Saya sendiri, Budi Rahman, sebelah kanan saya ada Bagas Irawanputra.

7. KETUA: ASWANTO

Baik. Ini berarti Kuasa KPU untuk Partai Berkarya, ya?

8. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 236-07-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BUDI RAHMAN

Partai Berkarya. Mohon izin, Yang Mulia. Jadi, dalam persidangan kali ini, KPU yang diwakili oleh 5 kantor hukum. Jadi, ada dari kantor (...)

9. KETUA: ASWANTO

Ya. Dari tadi juga begitu.

10. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 236-07-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BUDI RAHMAN

Betul, Yang Mulia.

11. KETUA: ASWANTO

Silakan (...)

12. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 236-07-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BUDI RAHMAN

Saya serahkan ke rekan-rekan (...)

13. KETUA: ASWANTO

Dari kantor hukum yang lain! Jangan Bapak yang mempersilakan. Harus Hakim yang mempersilakan, Hakim bisa loncat ke Bawaslu, bisa loncat ke sana. Silakan untuk Kuasa KPU dari kantor hukum yang lain!

14. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAUFIK HIDAYAT

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Kantor Hukum Nurhadi Sigit Law Office, dalam hal ini kami mewakili KPU RI dalam hal Permohonan dari Partai Demokrat Nomor 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Dan saya sendiri, Nama Taufik Hidayat.

15. KETUA: ASWANTO

Baik, cukup.

16. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAUFIK HIDAYAT

Terima kasih.

17. KETUA: ASWANTO

Masih ada Kuasa Hukum KPU dari kantor hukum yang lain?

18. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SUTIKNO

Masih ada, Yang Mulia, memperkenalkan kembali, nama saya Sutikno dari Kantor Absar Bandung dan rekan. Dalam hal ini menjadi Kuasa Hukum dari Termohon KPU RI dalam Perkara Nomor 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Gerindra Lampung. Terima kasih.

19. KETUA: ASWANTO

Ya. Ini Pak Sutikno kayaknya juga belum pada tidur ini. Mulai pagi di sini, ya? Baik. Selanjutnya ke Bawaslu, silakan!

20. BAWASLU: FRITZ EDWARD SIREGAR

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua.

Hari ini kami didampingi oleh Fatih Hatul Khoiriah, ada di sebelah kiri saya, Yang Mulia. Ket (...)

21. KETUA: ASWANTO

Sebentar ... sebentar. Silakan ... silakan. Sebentar, Pak ... Pak Fritz, kita kasih kesempatan dulu. Biar terlambat kita tetap hormai, gitu.

Kemarin kita ... apa namanya ... sepakat kalau 10 menit terpaksa harus menunggu di luar, ini baru 4 menit. Silakan, Pak Fritz!

22. BAWASLU: FRITZ EDWARD SIREGAR

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Di sebelah kiri saya Fatikul ... Fatih Hatul Khoiriah, Ketua Bawaslu Provinsi Lampung. Di sebelah kanan saya, Pak Tamri Suhaimi, Anggota Bawaslu Provinsi Lampung. Di belakang saya ada Pak Iskardo P. Panggar, Anggota Bawaslu Provinsi Lampung dibantu oleh Ibu Bella Oktaviani, dan saya Fritz Edward Siregar, Anggota Bawaslu. Terima kasih, Yang Mulia.

23. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Selanjutnya Pihak Terkait! Disebutkan Pihak Terkait untuk perkara nomor berapa dan apakah sudah mengajukan Permohonan sebagai Pihak Terkait (...)

24. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ZAINAL RAHMAN

Mohon izin, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Saya Zainal Rahman dan rekan saya, Herwanto. Kami sebagai Pihak Terkait Perkara 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

25. KETUA: ASWANTO

Oke. Saudara sudah memasukkan Permohonan sebagai Pihak Terkait?

26. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ZAINAL RAHMAN

Sudah, Yang Mulia. Sudah memasukkan Permohonan sebagai Pihak Terkait.

27. KETUA: ASWANTO

Dan ada persetujuan dari DPP, ya?

28. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ZAINAL RAHMAN

Ada, Yang Mulia.

29. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih.

30. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ZAINAL RAHMAN

Terima kasih.

31. KETUA: ASWANTO

Selanjutnya Pihak Terkait!

32. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PASKARIA TOMBI

Ya. Selamat malam. Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Tim Hukum PDI Perjuangan, Yang Mulia. Selaku Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 149-04-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, saya Paskaria Tombi, di sebelah kiri saya, Tanda Pardamaian, dan di belakang saya, Ibu Farida.

33. KETUA: ASWANTO

Baik. PDI juga sudah memasukkan permohonan, ya?

34. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PASKARIA TOMBI

Siap. Sudah, Yang Mulia.

35. KETUA: ASWANTO

Baik. Sebelum kita me ... yang baru masuk tadi part ... untuk partai apa itu? Pemohon nomor berapa?

36. KUASA HUKUM PEMOHON PEKARA NOMOR 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Partai Demokrat, Yang Mulia.

37. KETUA: ASWANTO

Partai Demokrat, ya?

38. KUASA HUKUM PEMOHON PEKARA NOMOR 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Ya. Untuk Lampung, Yang Mulia.

39. KETUA: ASWANTO

Partai Demokrat. Ya, oke. Silakan memperkenalkan diri!

40. KUASA HUKUM PEMOHON PEKARA NOMOR 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Oke.

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

Kami dari Partai Demokrat, Yang Mulia. Untuk mengajukan Permohonan Lampung. Kemudian nama saya, Yandri Sudarso, kemudian teman saya bernama (...)

41. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PANGIHUTAN BLASIUS HALOHO

Pangihutan Blasius Haloho.

42. KUASA HUKUM PEMOHON PEKARA NOMOR 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Demikian, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

43. KETUA: ASWANTO

Baik. Ini Partai Berkarya, belum hadir. Kita beri kesempatan sampai presentasi Permohonan 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 selesai. Kalau 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 sudah selesai, maka Perkara Nomor 236-07-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Berkarya, kita nyatakan gugur.

Perlu kami informasikan bahwa panel sudah melakukan gelar perkara terhadap Perkara Nomor 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Perkara Nomor 149-09-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, dan Perkara Nomor 236-07-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

Oleh sebab itu, kepada Pemohon diminta menyampaikan pokok-pokoknya saja dalam waktu yang tidak terlalu lama, 10-15 menit. Dan untuk memandu, dimohon kesediaan ... kesediaan Yang Mulia Bapak Prof. Saldi Isra. Silakan, Prof!

44. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Assalamualaikum wr. wb., selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Ini karena suasananya malam, jadi harus agak sedikit santai. Kalau kemarin sore itu banyak yang pakai topi kan, jadi kita jadi bergairah lagi bekerja. Malam ini saya lihat apalah yang bisa membangkitkan semangat kita.

Saya tertarik dengan modelnya Pak Fritz itu. Jadi, nanti lawyer ... tuh tiru juga tuh rambutnya Pak Fritz. Ya, kan? Lagi apa itu ... lagi berupaya mengembangkan model baru Beliau ini soal rambut. Jadi, jangan monoton kayak ... kayak begini aja terus, kayak begitu kan lumayan juga. Ya, Pak Fritz ya? Enggak apa-apa, ya? Kalau jadi trend kan bisa ada orang bayar ... apanya juga royalty-nya juga ke Pak Fritz nanti. Itu pertama.

Yang kedua, ini untuk memberikan hukuman kepada apa ... kepada Partai Demokrat karena telat, di list itu sebetulnya Partai Demokrat yang didaulat pertama untuk menyampaikan, tapi untuk menghormati ... apa namanya ... Gerindra karena duluan tepat waktu, kita beri kesempatan pertama kepada Partai Gerindra. Setuju, ya? Kalau tidak pun, Hakim akan memberikan paksaan untuk setuju, begitu.

45. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Baik, Yang Mulia.

46. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke, terima kasih. Gerindra itu ... apa namanya ... tercatat dengan registrasi 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, ya? Ada Permohonan yang diajukan itu 3 sebetulnya. 3, satu untuk DPR RI, satu lagi itu untuk yang internal, ya? Internal. Lalu satu lagi untuk kabupaten. Jadi, bisa dilihat ... kami sudah bisa lacak apa ... di Permohonannya itu.

Pertama dulu ini, sudah menyerahkan kopian apa ya sebagai advokat, ya ... kartu advokat, ya?

47. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDARSAM MARANTOKO

Sudah, Yang Mulia. Sudah.

48. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Itu kalau sudah syukur. Yang kedua, waktunya terbatas, jadi singkat-singkat saja supaya ... apa namanya ... kita bisa lebih cepat, lebih baik. Silakan! Siapa yang mau mewakili?

49. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDARSAM MARANTOKO

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Kita langsung saja untuk menyingkat. Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 Provinsi Lampung. Kewenangan Mahkamah Konstitusi kami lewatkan. Kedudukan hukum (Legal Standing) Pemohon, kami lewatkan. Tenggang waktu pengajuan permohonan, kami lewatkan. Kami langsung ke pokok Permohonan Provinsi Lampung.

Tabel persandingan perolehan suara calon anggota DPR menurut Termohon dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR Lampung, Dapil II, Nomor Urut 3, Bob Hasan, S.H., M.H., perolehan suara berdasarkan versi Termohon=29.796, berdasarkan versi Pemohon=59.921. Jadi, ada selisih 30.125.

Bahwa mengenai selisih perolehan suara sebagaimana di atas dengan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut. Bahwa dalam tahap proses penyelenggaraan pemilihan umum dalam daerah pemilihan Lampung 2, ditemukan banyak pemilih yang tidak menerima undangan untuk memilih atau C-6, sehingga pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya, di mana peristiwa pemilih yang tidak mendapatkan C-6 sebarannya terdapat pada 7 kabupaten dalam daerah pemilihan Lampung 2.

Bahwa selain itu, pada (...)

50. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ini ada buktinya, ya?

51. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDARSAM MARANTOKO

Ada, Yang Mulia.

52. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke.

53. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDARSAM MARANTOKO

Bahwa selain daripada itu, ternyata Pemohon juga menemukan adanya perbedaan penghitungan suara pada C-1 dan C-1 Plano yang diperoleh Pemohon melalui foto dari TPS, dari persandingan data yang dimiliki oleh Pemohon dimana jumlah perolehan suara Pemohon dan C-1 lebih rendah dari hasil penghitungan C-1 Plano.

Bahwa peristiwa sebagaimana di atas, jelas sangat mempengaruhi perolehan suara, di mana perolehan suara Pemohon seharusnya melebihi perolehan sebagaimana suara yang telah ditetapkan oleh Pemohon.

Bahwa berdasarkan rekapitulasi pleno KPUD Lampung, khususnya daerah pemilihan Lampung 2, perolehan suara sebesar 29.796 suara untuk Caleg Nomor 3 Partai Gerindra, yaitu Bob Hasan, S.H., M.H. dengan total jumlah suara Partai Gerindra dan kumpulan suara caleg sebesar 269.623 suara.

Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi Pleno KPUD Lampung untuk dapil yang sama total perolehan suara untuk Partai Golkar sebanyak 287.277 suara ... 281, maaf ya kan. PDI Perjuangan =416.077 suara.

Bahwa dalam perolehan perebutan ... bahwa dalam perebutan perolehan kursi yang menggunakan metode Sainte Lague atau pembagian 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Maka, tidaklah menjadikan suatu jaminan atas peros ... persoalan hak seorang caleg yang dapat memperoleh suara besar atau cukup besar untuk duduk atau memperoleh kesempatan satu kursi karena perhitungan tersebut juga harus didukung dengan perolehan suata partai khususnya.

Bahwa berdasarkan metode Sainte Lague menjadi suatu pengamatan dalam kerangka kontestasi caleg, andaipun perolehan peringkat 2, yaitu Golkar sebesar 281.277 suara, maka bila dibagi 3, yaitu menjadi 93.759 suara.

Oleh karenanya, partai lain yang mendapat yang mendapat kursi selanjutnya harus dapat melebihi jumlah sebanyak 93.759 tersebut. Hal

mana, Partai Amanat Nasional setelah diperbandingkan dalam C-1 Situng, khususnya untuk wilayah ... wilayah Kabupaten Mesuji memperoleh jumlah suara sebanyak 5.308 suara. Sementara dalam Pleno KPUD Lampung sebanyak 5.751 suara. Itu terdiri dari perolehan suara PAN plus caleg. Maka, terdapat selisih sebanyak 443 suara.

Bukti dan fakta di lapangan terjadi, yaitu penghitungan suara pada partai atau caleg Bob Hasan, S.H., M.H. Nomor Urut 3 dengan uraian sebagai berikut, kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

54. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ini ada 3, ya?

55. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDARSAM MARANTOKO

Ada 3.

56. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Yang diambil sebagai sampel, ya?

57. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDARSAM MARANTOKO

Betul, sebagai sampel sudah masuk dalam bukti juga.

58. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

59. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDARSAM MARANTOKO

Dari contoh penghitungan suara dengan data C-1 Plano terbatas, maka jumlah suara caleg Bob Hasan, S.H., M.H., dan suara Partai Gerindra mengalami kehilangan perolehan suara sebanyak 93 suara dari 3 TPS. Maka, dari itu demi tercapainya hak konstitusional The Protector of Citizens Constitutional Rights, caleg yang tentunya tidak terlepas dari jumlah perolehan suara Partai Gerindra menjadi merosot dan oleh karenanya adalah sebuah keniscayaan seluruh data C-1 Plano pada 7 kabupaten kota di Dapil Lampung I untuk dihitung ulang.

60. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke.

61. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDARSAM MARANTOKO

Kami langsung kepada Petitem, Yang Mulia?

62. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Silakan!

63. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDARSAM MARANTOKO

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada MK Majelis Kons ... Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut.

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-KPT sekian-sekian tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan berikutnya.

Ketiga, memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pemungutan suara susulan lanjutan terhadap para pemilih sebanyak kurang lebih 30.000 orang pemilih yang belum menggunakan hak pilihnya sepanjang daerah pemilihan Lampung II untuk pengisian keanggotaan DPR-RI.

Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum melakukan penghitungan ulang dengan membuka C-1 Plano sepanjang daerah pemilihan Lampung II untuk pengisian keanggotaan DPR-RI atau memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

64. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke, satu. Yang kedua?

65. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDARSAM MARANTOKO

Yang kedua, DPRD Kota Bandar Lampung Dapil Kota Bandar Lampung II. Kami meyajikan tabel persandingan perolehan suara partai politik menurut Termohon dan Pemohon Roy Dwi Suryono, Partai

Gerindra Nomor Urut 1 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Bandar Lampung.

Satu. Kelurahan Sukadana Ham TPS 1, Roy Dwi Suryono perolehan suaranya kosong, Pemohon=3, ada selisih 3 suara dan (...)

66. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ini semua yang TPS-TPS ini ada buktinya, ya?

67. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDARSAM MARANTOKO

Ya, ada buktinya.

68. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

TPS 1 ... 01 Sukadana, lalu (...)

69. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDARSAM MARANTOKO

Sukadana sudah ada, Sukadana Ham (...)

70. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Sukadana Ham, Sukajawa Baru, TPS 13 Permai (...)

71. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDARSAM MARANTOKO

TPS 13 Permai ya sampai (...)

72. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Itu semua ada buktinya, ya?

73. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDARSAM MARANTOKO

Sampai ada buktinya. Metodenya kita perbandingan perolehan suara saja, Yang Mulia.

74. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke.

75. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDARSAM MARANTOKO

Berikutnya tabel persandingan suara calon anggota DPRD Roy Dwi Suryono, Partai Gerindra Nomor Urut 1 menurut Termohon dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Bandar Lampung. Roy Dwi Suryono suara Termohon berdasarkan Termohon=977, berdasarkan versi Pemohon=1.019 suara, jadi ada selisih 42 suara.

Untuk Dafryan Angara perolehan suara menurut versi Termohon=1.155, menurut versi Pemohon=1.085, jadi ada selisih 70 suara.

Bahwa mengenai selisih perolehan suara sebagaimana di atas dengan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut. Bahwa Termohon dalam melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara telah terjadi pengurangan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Bandar Lampung Dapil II.

Dan sebaliknya, telah terjadi penambahan suara caleg lain, yaitu Dafryan Angara sebagaimana telah diuraikan pada tabel di atas.

76. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke.

77. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDARSAM MARANTOKO

Bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon caleg Nomor 1 atas nama Roy (...)

78. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Sebentar, ini Roy Dwi Suryono ini mengalami minus 42, ya?

79. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDARSAM MARANTOKO

Betul, Yang Mulia.

80. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Di halaman 13 itu.

Lalu Dafryan Angara Anda dalilkan plus 70?

81. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDARSAM MARANTOKO

Plus 70 berdasarkan penghitungan.

82. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ini yang kurang tandanya ini.

83. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDARSAM MARANTOKO

Ya, betul.

84. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, silakan!

85. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDARSAM MARANTOKO

Poin 2 (...)

86. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Langsung ke Petitum, ya?

87. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDARSAM MARANTOKO

Langsung ke Petitum, baik.

88. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, silakan!

89. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDARSAM MARANTOKO

Petitum.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Kap ... Komisi Pemilihan Umum Nomor 987 dan seterusnya.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Bandar

Lampung Dapil II, Bandar Lampung atas nama Roy Dwi Suryono sebesar 1.019, atas nama Dafryan Angara sebesar 1.085.

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan keputusan ini atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

90. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga Kabupaten Tanggamus, ya?

91. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDARSAM MARANTOKO

Tanggamus, Yang Mulia.

92. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Silakan!

93. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDARSAM MARANTOKO

Kabupaten (...)

94. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ini yang Tanggamus berhadapan dengan apa, ya? PDI-P, ya?

95. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDARSAM MARANTOKO

PDI ... PDI-P.

96. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke, silakan!

97. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDARSAM MARANTOKO

Terima kasih, Yang Mulia.

Tanggamus kami sajikan tabel persandingan perolehan suara partai politik menurut Termohon dan Pemohon untuk pengisian

keanggotaan DPRD Kabupaten Tanggamus, Dapil Tanggamus I. Partai Gerindra perolehan suara versi Termohon=2.653, berdasarkan versi Pemohon=2.685, ada selisih 32 suara. PDI-P beras ... perolehan suara berdasarkan versi Termohon=13.797, perolehan suara berdasarkan versi Pemohon=12.675, ada selisih 1.122.

98. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Silakan lanjut!

99. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDARSAM MARANTOKO

Bahwa pada saat rekapitulasi oleh Termohon telah terjadi pengurangan suara Pemohon sebagaimana pada Kecamatan Semaka dimana pada C-1 perolehan suara Pemohon sebanyak 29 suara. Akan tetapi, pada saat pemindahan data ke DAA-1 menjadi 18 suara, sehingga terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak 11 suara.

Demikian juga pada Kecamatan Pematang Sawah dimana pada C-1 perolehan suara Pemohon sebanyak 42 suara. Akan tetapi, pada saat pemindahan data ke DAA-1 menjadi 21 ... menjadi 21 suara, sehingga terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak 21 suara sehingga total pengurangan suara Pemohon sebanyak 32 suara.

Bahwa diduga terjadi penambahan dan/atau pemindahan suara dari partai dan caleg Partai Gerindra ke Partai PDP ... ke PDI-P sebagaimana Kecamatan Bandar Negeri Semuong pada C-1 sebanyak 47 suara, namun pada DAA-1 menjadi 33 suara sehingga terdapat penambahan 85 suara. Kecamatan Semaka dimana pada C-1 perolehan suara sebanyak 518 suara, akan tetapi pada pemindahan data ke DAA-1 menjadi 1.264 ... 1.264 suara sehingga terdapat penambahan suara sebanyak 746 suara.

Demikian juga pada Kecamatan Pematang Sawah dimana C-1 perolehan suara sebanyak 312 suara. Akan tetapi, pada pemindahan data ke DAA-1 menjadi 603 suara sehingga terdapat penambahan suara sebanyak 291 suara.

Kami sajikan tabel persandingan suara menurut Termohon dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Tanggamus di Kecamatan Bandar Negeri Semuong Perpekong. Data terlampir, Yang Mulia.

100. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Silakan! Terus?

101. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDARSAM MARANTOKO

Kecamatan Bandar Negeri Semuong Pekong, Pekon Sinar ... Pekon Sanggi, Pekon Sinar Bangun, Pekon Atar Lebar, Pekon Tulung Sari, Pekon Raja Basa, Pekon Gunung Doh.

Dua. Tabel persandingan suara Pemohon dan Termohon untuk pengisian keanggotaan DPR Kabupaten Tanggamus di Kecamatan Bandar Negeri Semuong. Partai PDI-P perolehan suara C-1 Pemohon sebesar 247, DAA-1 Termohon=332, ada selisih 85 suara. Keterangannya bahwa terjadi penggelembungan suara partai Termohon PDI-P sebanyak 85 suara.

Tabel 3. Persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Tanggamus Kecamatan Semaka per pekon per TPS. Kecamatan Semaka Pekon Kaca Pura, Pekon Margo Mulyo, Pekon Bangun Rejo, Pekon Sedayu, Pekon Sukaraja, Pekon Garut, Pekon Tugu Rejo, Pekon Kanoman.

Empat. Tabel persandingan suara menurut Termohon dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Tanggamus di Kecamatan Semaka. Partai PDI perolehan suara C-1 Pemohon=518 suara, DAA-1 Termohon sera ... 1.264 suara, jadi ada selisih sebesar 746 suara. Yang dikasihnya suara partai ... suara partai Termohon menggelembung menjadi 746 suara. Kedua, Gerindra, perolehan suara C-1 Pemohon=29 suara, DAA-1 Termohon=18 suara, ada selisih sebesar 11 suara.

Lima. Tabel persandingan suara menurut Termohon dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Tanggamus, Kecamatan Pematang Sawah per pekon per TPS. Kecamatan Pematang Sawah, Pekon Tanjungan, data terlampir, Pekon Tanjungan, Pekon Martanda, Pekon Kampung Baru.

Empat. Tabel persandingan suara menurut Termohon dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Tanggamus di Kecamatan Pematang Sawah. Partai PDI-P perolehan suara C sat ... berdasarkan C-1 Pemohon=312 suara, berdasarkan DAA-1 Termohon=603 suara, ada selisih sebesar 291 suara. Keterangan, surat partai Termohon menggelembung sebanyak 291 suara. Gerindra, perolehan suara C-1 pemo ... berdasarkan C-1 Pemohon=42 suara, berdasarkan DAA-1 Termohon=21 suara, ada selisih sebesar 21 suara. Keterangannya, suara partai Pemohon Gerindra berkurang menjadi 21 suara.

Bahwa atas permasalahan tersebut, Pemohon mengetahui pada saat setelah rekapitulasi di tingkat kecamatan dan oleh karenanya Pemohon membuat laporan kepada Bawaslu Kabupaten Tanggamus dan menyampaikan pernyataan keberatan pada Model DB-2 KPU.

Bahwa terkait dengan laporan Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Tanggamus, pihak Bawaslu Kabupaten Tanggamus telah memberikan jawaban sebagaimana Surat Bawaslu Nomor 075/K.LA-08/PM.00.02/V/2019 yang pada pokoknya menerangkan agar pihak Pemohon dan KPUD Kabupaten Tanggamus untuk menyandingkan data pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten Tanggamus. Namun dengan alasan yang tidak diketahui oleh kabu ... namun dengan alasan yang tidak diketahui, pihak Kabupaten Tanggamus menolak penyandingan data dan meminta pihak Pemohon membuat keberatan atau catatan khusus dalam Form DB-2 KPU (...)

102. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Jadi Bawaslu itu suruh menyandingkan, ya?

103. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDARSAM MARANTOKO

Ya.

104. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke.

105. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDARSAM MARANTOKO

Tidak ditinjaulanjuti, ya, Pak?

106. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Menyandingkanpun tidak dilakukan?

107. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDARSAM MARANTOKO

Tidak dilakukan.

108. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke, nanti kita tanya ke sana nanti.

109. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDARSAM MARANTOKO

Bahwa akibat terjadinya pengurangan suara tersebut, Pemohon telah dirugikan karena tidak mendapat perolehan kursi yang semestinya, mendapatkan perolehan kursi terakhir Dapil Tanggamus I. Dan telah menjadikan perolehan kursi terakhir oleh PDI-P.

Bahwa Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara Pemohon sebagaimana data persandingan di atas dan apabila tidak terdapat pengurangan perolehan suara Pemohon oleh Termohon, serta juga tidak terdapat penambahan suara, sebagaimana diuraikan di atas, maka dan telah sepatutnya Termohon untuk menjadikan Pemohon sebagai calon yang memperoleh kursi untuk pengisian DPRD Kabupaten Tanggamus, Dapil Tanggamus I.

Petitum.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat ... Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, per tanggal 21 Mei 2019, sepanjang di daerah pemilihan anggota DPR RI Kabupaten Tanggamus, Dapil Tanggamus I.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Tanggamus, Dapil Tanggamus I. Partai Gerindra perolehan suara sebesar=200 ... 2.000.000 ... 2.685 suara. Partai PDI-P=12.675 suara.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini, atau apabila Majelis ... Mahkamah Konstitusi berpada ... berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Kuasa Pemohon.

110. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, terima kasih (...)

111. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDARSAM MARANTOKO

Terima kasih, Yang Mulia.

112. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Tadi yang membacakan, siapa namanya?

113. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDARSAM MARANTOKO

Hendarsam Marantoko, Yang Mulia.

114. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Herdarsam (...)

115. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDARSAM MARANTOKO

Marantoko.

116. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Tapi, di sini enggak ada tanda tangan Bapak ini.

117. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDARSAM MARANTOKO

Ya, di (...)

118. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ini tidak tanda tangan saja, bisa bacakan selama ini, apalagi kalau yang tanda tangan itu, kan.

119. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDARSAM MARANTOKO

Yang penting ada di Kuasa, Yang Mulia.

120. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ada di Kuasa, ya? Oke, ini karena di sini belum ada, nanti kita lihat di kuasanya yang ... yang baru itu. Sudah, ya? Cukup?

121. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDARSAM MARANTOKO

Cukup, Yang Mulia.

122. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke, ya. Kalau cukup, ada ... silakan, Yang Mulia!

123. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, hanya mau mengkonfirmasi juga ini, di halaman 9 Petiumnya. Ini ada permohonan agar melakukan pemungutan suara susulan atau lanjutan itu, ya.

124. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDARSAM MARANTOKO

Baik, Yang Mulia.

125. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Tentu ada angka, angka itu 30.000 orang. Kira-kira logikanya, memperoleh angka 30.000 itu tentu kan ada hitung-hitungannya. Saya melihat di poin 14, di Posita ... Posita Anda seperti itu. Tapi, bagaimana itu 30.000 itu, angka itu bisa keluar?

126. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDARSAM MARANTOKO

Mungkin bisa di ... mungkin Prinsipal kami yang bisa menjelaskan.

127. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Silakan!

128. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDARSAM MARANTOKO

Berikut, Yang Mulia.

129. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Silakan!

130. PEMOHON PERKARA NOMOR 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BOB HASAN

Terima kasih, Yang Mulia. Jadi, perlu kami sampaikan bahwa 30.000 itu diperoleh dari sebaran 7 kabupaten dimana ketika kita kebetulan juga ada satu observasi dari sebuah LSM yang memang kami pimpin juga, dan kami menemukan undangan C-6 tidak diperoleh, tapi mereka ketika hadir dalam 1 TPS itu ada kurang lebih ada 77 ... 77 yang hadir, tapi mereka tidak bisa memilih karena tidak memperoleh undangan C-6 dan kertas suara untuk RI dan presiden itu memang habis, demikian.

Maka ketika dijanjikan oleh pengurus PPS setempat ditunggu jam 14.00 WIB, mereka menunggu sampai dengan pukul 13.00 WIB sampai 13.30 WIB karena mereka ada kegiatan yang lainnya, maka mereka kembali.

131. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, kira-kira ini ada nanti bukti untuk me (...)

132. PEMOHON PERKARA NOMOR 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BOB HASAN

Ada, Yang Mulia.

133. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Mengarah ke sana, ya?

134. PEMOHON PERKARA NOMOR 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BOB HASAN

Ada, Yang Mulia.

135. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

136. PEMOHON PERKARA NOMOR 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BOB HASAN

Semua identitas, e-KTP nya kami akan (...)

137. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, oke. Terima kasih.

138. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke, terima kasih. Ini yang 30.000 ... lebih kurang 30.000 ini dari 7 kabupaten/kota, ya? Oke, klir? Ada lagi tambahan, Yang Mulia? Cukup? Nah, ini Gerindra sudah selesai. Tapi, satu hal catatan kami, inikan karena ada yang di internal, ya ... ada yang di internal, kan?

139. PEMOHON PERKARA NOMOR 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BOB HASAN

Ya.

140. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, ini belum melampirkan KTA-nya ini. Prinsip ... apanya ... Kartu Tanda Anggota nya.

141. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDARSAM MARANTOKO

Untuk ... resepsioni akan kami lengkapi, Yang Mulia.

142. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, ya, dilengkapi, ya.

143. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 149-02-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDARSAM MARANTOKO

Catatan kami (...)

144. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Supaya untuk melihat benar atau tidak, kan. Walaupun sebetulnya ... apa namanya ... tidak masalah dengan pokok perkara, tapikan itu penting juga untuk kelengkapan ... apa namanya ... kelengkapan Permohonan ini.

Jadi, ini kami perlihatkan ... kami sebetulnya sudah lakukan telaah kayak begini, ini. Jadi untuk membuktikan saja ke kita semua bahwa kami, Hakim, membaca apa yang disampaikan itu. Ini ... nah, tapi ada kode-kodenya itu, rahasianya di kami lah, tidak boleh kami ... Pak ... Pak

... apa namanya ... Pak Bob Hasan, ya? Nah, Pak Bob Hasan enggak boleh tahu itu. Kalau tahu, terbuka rahasia itu.

Silakan, yang berikutnya dari Partai Demokrat! Dari Partai Demokrat, siapa kuasa yang hadir ini?

145. KUASA HUKUM PEMOHON PEKARA NOMOR 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Dari ... Assalamualaikum wr. wb.

146. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Walaikumsalam wr. wb.

147. KUASA HUKUM PEMOHON PEKARA NOMOR 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Kuasa Hukum yang hadir, Yandri Sudarso. Kemudian (...)

148. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nomor 6, ya?

149. KUASA HUKUM PEMOHON PEKARA NOMOR 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Ya.

150. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Setelah itu?

151. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PANGIHUTAN BLASIVUS HALOHO

Pangihutan Blasius Haloho, Yang Mulia.

152. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nomor 13, bentar. Ini kita periksa ke belakang, Bapak ikut tanda tangan atau tidak ini?

153. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PANGIHUTAN BLASIOUS HALOHO

Untuk di permohonan, tidak, Yang Mulia.

154. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, gitu. Saya takut nih kalau Bapak tidak tanda tangan, nanti honorinya tidak dibayar, ini susahnya.

155. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PANGIHUTAN BLASIOUS HALOHO

Baik, Yang Mulia akan dilengkapi agar honorinya dibayar.

156. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, itu. Itu penting kan, silakan, apa namanya, dari catatan kami bahwa yang dipersoalkan itu ada di ... apa ... Tanggamus, ya?

157. KUASA HUKUM PEMOHON PEKARA NOMOR 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Ya, Yang Mulia.

158. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Tanggamus (...)

159. KUASA HUKUM PEMOHON PEKARA NOMOR 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Ya.

160. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Kemudian, ada yang di internal itu DPRD provinsi, ya?

161. KUASA HUKUM PEMOHON PEKARA NOMOR 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Ya, Yang Mulia.

162. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ir. H. Yandri Nazir, M.M., Dapil VIII, Lampung Timur. Dua itu, ya?

163. KUASA HUKUM PEMOHON PEKARA NOMOR 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Ya, Yang Mulia.

164. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Silakan!

165. KUASA HUKUM PEMOHON PEKARA NOMOR 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Oke, Yang Mulia. Baik, kami mulai bahwa kami mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987 Tahun 2019.

Kemudian, mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi (...)

166. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Dilewati saja.

167. KUASA HUKUM PEMOHON PEKARA NOMOR 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Dianggap dibacakan.

168. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

169. KUASA HUKUM PEMOHON PEKARA NOMOR 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Kedudukan Hukum juga dianggap dibacakan.

170. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

171. KUASA HUKUM PEMOHON PEKARA NOMOR 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Kemudian mengenai tenggang waktu pengajuan, kami anggap dibacakan juga.

172. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, silakan!

173. KUASA HUKUM PEMOHON PEKARA NOMOR 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Kemudian mengenai Permohonan, kami akan menyampaikan dahulu yang pertama. Yang Saudara Ir. H. Yandri Nazir, Caleg Provinsi Dapil VIII, Lampung Timur, Nomor Urut 1.

174. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Silakan!

175. KUASA HUKUM PEMOHON PEKARA NOMOR 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Pokok permohonannya kami adalah yang pertama, Yang Mulia. Menurut Termohon, suara dari Caleg Nomor Urut 1 itu adalah 16.431. Kemudian, Caleg Nomor (...)

176. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Itu tab ... di tabel berapa itu?

177. KUASA HUKUM PEMOHON PEKARA NOMOR 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Di halaman ... halaman 24, Yang Mulia.

178. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Bentar, saya cek dahulu. Halaman 24, oke. H. Yandri ini 16.000?

179. KUASA HUKUM PEMOHON PEKARA NOMOR 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

431.

180. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke.

181. KUASA HUKUM PEMOHON PEKARA NOMOR 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Kemudian, Caleg Nomor 5, atas nama Asep Makmur=16.717.

182. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ini versi Termohon, ya?

183. KUASA HUKUM PEMOHON PEKARA NOMOR 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Versi Temoron ... Termohon. Jadi ada selisih 286 suara.

184. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

286 suara, ya.

185. KUASA HUKUM PEMOHON PEKARA NOMOR 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Ya.

186. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Silakan!

187. KUASA HUKUM PEMOHON PEKARA NOMOR 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Menurut Pemohon, suara dari Pemohon itu adalah 16.477 suara.

188. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

16.447 atau 77?

189. KUASA HUKUM PEMOHON PEKARA NOMOR 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

447.

190. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, tadi 477, 30 ini lisannya saja sudah beda ini dengan yang ditulis. Silakan!

191. KUASA HUKUM PEMOHON PEKARA NOMOR 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Kemudian suara Caleg Nomor Urut 5=16.038 suara.

192. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke.

193. KUASA HUKUM PEMOHON PEKARA NOMOR 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Jadi, ada selisih 409 suara.

194. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Silakan, teruskan!

195. KUASA HUKUM PEMOHON PEKARA NOMOR 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Nah, jadi hal ini disebabkan oleh adanya temuan-temuan dari kami di ... di lapangan bahwa telah terjadi penggelembungan suara yang dilakukan oleh Caleg Nomor Urut 5.

196. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Di 27 TPS?

197. KUASA HUKUM PEMOHON PEKARA NOMOR 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Di 27 TPS, Yang Mulia.

198. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Di itu ... itu di ... apa ya (...)

199. KUASA HUKUM PEMOHON PEKARA NOMOR 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Ya.

200. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Dicantumkan semuanya di halaman 24 sampai 25.

201. KUASA HUKUM PEMOHON PEKARA NOMOR 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Ya dan kami juga sudah menyampaikan bukti-buktinya, Yang Mulia.

202. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke, kalau bukti Pemohon, ya kita terima. Nanti kan disandingan dengan Termohon yang lain-lain.

203. KUASA HUKUM PEMOHON PEKARA NOMOR 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Ya, Yang Mulia.

204. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Silakan!

205. KUASA HUKUM PEMOHON PEKARA NOMOR 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Terhadap permasalahan ini, Pemohon sudah menyampaikannya ke KPU Provinsi Lampung. Nah pada saat itu sudah dilakukan ... sudah diberikan rekomendasi untuk penghitungan suara ulang. Namun, se ... se ... PSU itu memang tetap dilaksanakan, tetapi tidak penghitungan suara ulang.

206. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Apa yang dilakukan?

207. KUASA HUKUM PEMOHON PEKARA NOMOR 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Yang dilakukan hanya ... hanya melihat C-1 Plano nya dan C-1 (...)

208. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke.

209. KUASA HUKUM PEMOHON PEKARA NOMOR 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Hologramnya, Yang Mulia.

210. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Yang diminta itu dilakukan penghitungan suara ulang, ya?

211. KUASA HUKUM PEMOHON PEKARA NOMOR 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Ya.

212. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Lalu kemudian KPU cuma melihat kembali C-1 Plano dengan?

213. KUASA HUKUM PEMOHON PEKARA NOMOR 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

C-1 hologram.

214. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Hologram, oke.

215. KUASA HUKUM PEMOHON PEKARA NOMOR 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Kemudian pada saat itu juga pemberitahuan mengenai PSU-nya itu mendadak, sehingga (...)

216. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke.

217. KUASA HUKUM PEMOHON PEKARA NOMOR 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Yang hadir itu adalah saksi dari DPC.

218. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke.

219. KUASA HUKUM PEMOHON PEKARA NOMOR 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Saksi DPC itu adalah ininya, orangnya Caleg Nomor Urut 5, sementara sebetulnya (...)

220. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Orangnya ini, apa maksudnya ini?

221. KUASA HUKUM PEMOHON PEKARA NOMOR 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Timnya (...)

222. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ini berjas-jelas lah kita ini, berjas-jelas, jangan nanti orangnya tuh kan (...)

223. KUASA HUKUM PEMOHON PEKARA NOMOR 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Timnya ... timnya Caleg Nomor Urut 5.

224. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Pak Asep Makmur (...)

225. KUASA HUKUM PEMOHON PEKARA NOMOR 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Ya.

226. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Gitu, ya (...)

227. KUASA HUKUM PEMOHON PEKARA NOMOR 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Jadi (...)

228. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke, inikan kalau orang di dalam partai ini bersengketa, rumit kita jadinya ini.

229. KUASA HUKUM PEMOHON PEKARA NOMOR 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Betul.

230. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Itu menceritakan keluarga sendiri keluar ini yang susah kita ini. Terus lah!

231. KUASA HUKUM PEMOHON PEKARA NOMOR 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Ya, jadi padahal sebetulnya saksi mandat itu adalah ... yang diberikan waktu PSU itu adalah caleg Pemohon. Gitu, Yang Mulia.

232. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke. Nanti kalau saksi mandatnya caleg Pemohon, nanti yang lain lagi yang menggugat, Pak Asep Makmur lagi yang menggugat di sini kan?

233. KUASA HUKUM PEMOHON PEKARA NOMOR 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Ya.

234. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Silakan, terus!

235. KUASA HUKUM PEMOHON PEKARA NOMOR 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Jadi itu, Yang Mulia. Jadi, akhirnya PSU tidak terlaksana, kemudian sampai sekarang tidak terlaksana dan sebetulnya menurut C-1 yang ... yang kami kumpulkan ... yang dikumpulkan Pemohon, baik dari beberapa partai, kemudian dari data C-1 Bawaslu. Ya, sebetulnya Pemohon lah yang (suara tidak terdengar jelas), Yang Mulia.

236. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya. Kalau yang mendalilkan kan tentu begitu?

237. KUASA HUKUM PEMOHON PEKARA NOMOR 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Ya.

238. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Masa mendalilkan ke sini dibilang kalah, kan ndak mungkin juga. Nanti pokoknya semuanya kita adu saja. Ini data dari sini diadu, kita lihat, gitu. Ini kalau kabur-kabur kita ... ah, ini susah ini, kan? Pokoknya semuanya itu. Tapi, yang namanya usaha, ya, silakan lah, begitu. Silakan!

239. KUASA HUKUM PEMOHON PEKARA NOMOR 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Siap, Yang Mulia. Jadi, kami masuk ke Petitemnya, Yang Mulia.

240. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, silakan!

241. KUASA HUKUM PEMOHON PEKARA NOMOR 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Jadi, Petitemnya yang pertama adalah mengabulkan Permohonan Pemohon.

242. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Untuk seluruhnya?

243. KUASA HUKUM PEMOHON PEKARA NOMOR 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Ya, untuk seluruhnya. Kemudian yang kedua, membatalkan keputusan-keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987 dan seterusnya, 2019, sepanjang ... dan tidak termasuk TPS yang 20 ... eh ... sepanjang ... sepanjang 27 TPS yang kami masalahkan.

244. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke. Jadi, yang dibatalkan itu hanya sepanjang 27 TPS di atas, ya?

245. KUASA HUKUM PEMOHON PEKARA NOMOR 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Ya.

246. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Yang ada list-nya itu?

247. KUASA HUKUM PEMOHON PEKARA NOMOR 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Ya, Yang Mulia.

248. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke, silakan berikutnya!

249. KUASA HUKUM PEMOHON PEKARA NOMOR 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Kemudian ini yang keempatnya ini karena kebetulan ini sama, Yang Mulia (...)

250. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Kok 3-nya belum ini? Langsung saja melompat keempat. Padahal ada nomornya 3-nya di sini.

251. KUASA HUKUM PEMOHON PEKARA NOMOR 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Oh, ya ... ya. Yang ketiga, Yang Mulia, mohon maaf. Yang ketiga memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan penghitungan suara ulang di 27 TPS yang kami permasalahan itu, Yang Mulia.

252. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke. 27 TPS di atas, ya?

253. KUASA HUKUM PEMOHON PEKARA NOMOR 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Ya, Yang Mulia.

254. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nanti kita cek ini, sama ndak TPS-nya ini antara yang ada dalam Petitum dengan yang ada di Posita, itu.

255. KUASA HUKUM PEMOHON PEKARA NOMOR 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Siap, Yang Mulia. Sama, insya Allah, Yang Mulia.

256. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya. Terus?

257. KUASA HUKUM PEMOHON PEKARA NOMOR 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Kemudian, yang keempatnya kami koreksi, Yang Mulia. Ini sama dengan nomor 3 ini, Yang Mulia, sebetulnya.

258. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Jadi, yang mana yang mau dipakai?

259. KUASA HUKUM PEMOHON PEKARA NOMOR 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Yang nomor 3, Yang Mulia.

260. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Yang nomor 3, oke. Ini didengar semua, ya? Bahwa mereka menarik ... minta menghapus Petitem yang nomor 4. Silakan!

261. KUASA HUKUM PEMOHON PEKARA NOMOR 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Kemudian memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Begitu, Yang Mulia.

262. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke. Cukup?

263. KUASA HUKUM PEMOHON PEKARA NOMOR 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Cukup, Yang Mulia.

264. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ada lagi yang mau disampaikan?

265. KUASA HUKUM PEMOHON PEKARA NOMOR 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANDRI SUDARSO

Ada 1 lagi, kawan saya yang akan menyampaikan, Yang Mulia.

266. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, itu karena menerima honorinya dua-dua, jangan 1 saja. Kaya sebentar ini, kan? Tapi dimatikan dulu. Silakan ... silakan!

267. KUASA HUKUM PEMOHON PEKARA NOMOR 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PANGIHUTAN B. HALOHO

Baik, Yang Mulia, terima kasih. Yang (...)

268. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ini mulai dari halaman berap ... berapa mau kita buka, ini? Pak Pang ... Pangihutan ... Pangihutan B. Haloho.

269. KUASA HUKUM PEMOHON PEKARA NOMOR 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PANGIHUTAN B. HALOHO

Halaman 8, Yang Mulia.

270. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke. Silakan!

271. KUASA HUKUM PEMOHON PEKARA NOMOR 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PANGIHUTAN B. HALOHO

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum (...)

272. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ini dapil, ya? Kabupaten Tanggamus, ya? Dapil Tanggamus IV?

273. KUASA HUKUM PEMOHON PEKARA NOMOR 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PANGIHUTAN B. HALOHO

Ya. Baik, Yang Mulia.

274. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Silakan!

275. KUASA HUKUM PEMOHON PEKARA NOMOR 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PANGIHUTAN B. HALOHO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

276. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Walaikumsalam wr. wb.

277. KUASA HUKUM PEMOHON PEKARA NOMOR 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PANGIHUTAN B. HALOHO

Yang kami muliakan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang kami hormati Termohon, juga ... atau Kuasa Hukum, dan juga teman-teman dari Pihak Terkait atau Kuasa Hukumnya.

Kita langsung untuk Permohonan, Yang Mulia (...)

278. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, silakan!

279. KUASA HUKUM PEMOHON PEKARA NOMOR 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PANGIHUTAN B. HALOHO

Bahwa untuk Tanggamus ini, terkait dengan Kedudukan Hukum (...)

280. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Itu enggak usah (...)

281. KUASA HUKUM PEMOHON PEKARA NOMOR 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PANGIHUTAN B. HALOHO

Dianggap dibacakan (...)

282. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Pokoknya langsung, masuk ke pokok saja!

283. KUASA HUKUM PEMOHON PEKARA NOMOR 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PANGIHUTAN B. HALOHO

Baik, Yang Mulia.

284. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, walaupun lawyer-nya itu dibayar sejak dari awal, tapi kita di dalam ruangan ini sampaikan pokok-pokoknya saja!

285. KUASA HUKUM PEMOHON PEKARA NOMOR 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PANGIHUTAN B. HALOHO

Baik, Yang Mulia. Langsung ... ini, Yang Mulia, ke pokok permasalahan.

286. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, silakan!

287. KUASA HUKUM PEMOHON PEKARA NOMOR 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PANGIHUTAN B. HALOHO

Bahwa kami di Petitem (...)

288. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Langsung ke Petitem, ini?

289. KUASA HUKUM PEMOHON PEKARA NOMOR 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PANGIHUTAN B. HALOHO

Ya, menyatakan untuk mencabut Permohonan ini, Yang Mulia. Demikian, terima kasih, Yang Mulia.

290. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oh, saya ... kami pikir itu jauh sekali mutarnya. Rupanya mencabut rupanya.

291. KUASA HUKUM PEMOHON PEKARA NOMOR 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PANGIHUTAN B. HALOHO

Biar enggak tegang, Yang Mulia.

292. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Bagus juga itu, kan? Jadi, bikin orang gembira itu sedekah juga, itu.

293. KUASA HUKUM PEMOHON PEKARA NOMOR 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PANGIHUTAN B. HALOHO

Ya, Yang Mulia.

294. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih. Jadi, yang ini ditarik, ya?

295. KUASA HUKUM PEMOHON PEKARA NOMOR 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PANGIHUTAN B. HALOHO

Ya, Yang Mulia.

296. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ditarik ... Anda ini ditarik gara-gara enggak bayar atau gimana ini?

297. KUASA HUKUM PEMOHON PEKARA NOMOR 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PANGIHUTAN B. HALOHO

Oh, bukan, Yang Mulia. Mungkin ya karena ada satu pertimbangan (...)

298. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke. Itu ... Itu berkelakar saja.

299. KUASA HUKUM PEMOHON PEKARA NOMOR 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PANGIHUTAN B. HALOHO

Ya. Baik, Yang Mulia.

300. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke. Kalau begitu, berarti sudah selesai, ya?

301. KUASA HUKUM PEMOHON PEKARA NOMOR 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PANGIHUTAN B. HALOHO

Selesai, Yang Mulia, dari Partai Demokrat.

302. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Sudah selesai. Ini kalau begini kan kita Hakim jadi enak juga, begini. Harusnya pulang pukul 21.00 WIB, bisa jadi lebih cepat kita pulang. Ini sudah selesai dari Demokrat.

Yang terakhir tadi dari Partai Berkarya. Nah, sampai sekarang belum muncul. Nanti soal ini saya pulangkan kepada Ketua Panel. Dipersilakan, Yang Mulia!

303. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Sesuai dengan penyampaian kami pada awal sidang tadi bahwa untuk Partai Berkarya kita masih tetap memberi kesempatan sampai selesainya 2 Permohonan ini dibacakan, dan ternyata 2 Permohonan sudah selesai, dan Berkarya juga belum hadir sehingga panel menyatakan bahwa Perkara Nomor 23 ... Perkara

Nomor 236-07-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Berkarya itu dinyatakan gugur.

Sekarang kita ... ya, tadi Kuasa Hukum dari Demokrat sepanjang kemarin kita sidang belum ada Kuasa Hukum Pemohon yang menyampaikan rasa hormat kepada Termohon, kepada Terkait, kepada Bawaslu. Tadi barusan ini disampaikan. Ya, apalagi ... ya, saya kira ada hubungannya dengan pencabutan. Ya, kita selesaikan. Saya hormati Bapak, saya hormati Ibu, kasusnya kami cabut, begitu, ya?

304. KUASA HUKUM PEMOHON PEKARA NOMOR 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PANGIHUTAN B. HALOHO

Bukan, Yang Mulia. Etika persidangan saja, Yang Mulia.

305. KETUA: ASWANTO

Oh, gitu. Tapi mulai kemarin belum ada itu, ya. Baru kali ini, terima kasih.

Baik, kita sahkan bukti dulu. Untuk Partai Gerindra, Dapil I ... dapil untuk ... Dapil I, Kota I ... Dapil II, Kota Bandar, kemudian Kabupaten Tanggamus I, kemudian DPR RI Lampung II, lalu Provinsi Lampung, bukti yang diajukan P-2.DPR RI.1 sampai dengan P-2.DPR RI.1-3, dan P-2.DPR RI.12 sampai dengan P-2.DPR RI.121. Kemudian, untuk DPRD, P-2.DPRD Kota-1 sampai dengan P-2.DPRD Kota-23. Kemudian, untuk DPRD kabupaten, P-2.DPRD kabupaten-1 sampai dengan P-2.DPRD kabupaten-65. Ini banyak catatannya ini. Bukti ... ini ada catatan, nanti di ... apa ... konfirmasi kembali ke bagian Kepaniteraan karena ini catatannya banyak sekali. Bukti P-2 ... P-2 D1.DPR RI.19 itu tidak ada keterangan TPS 2 pada bukti ... pada bukti fisik. Nggak ada di bukti fisiknya. Kemudian, Bukti P-2.DPR RI.20 untuk TPS 5 tidak ada bukti fisik. Kemudian, Bukti P-2.DPR RI.29 pada TPS 01, tidak terdapat perolehan Partai Gerindra. Kemudian, Bukti P-2.DPR RI.33, tidak ada bukti fisik untuk Formulir C-1 DPR Kelurahan Simpang Mesuji TPS 01 sampai dengan TPS 10. Bukti P-2.DPR RI.39, tidak ada keterangan TPS 2 pada bukti fisik. Kemudian Bukti P-2.DPR RI.41, di daftar alat bukti Kelurahan Simpang Pematang, bukti fisik Kelurahan Mesuji. Nanti disinkronkan, ya. Kemudian Bukti P-2.DPR RI.47, tidak ada bukti fisik untuk TPS 1. Kemudian, Bukti P-2.DPR RI.54, tidak ada keterangan TPS 7 pada bukti fisiknya. Kemudian, Bukti P-2.DPR RI.61, tidak ada keterangan untuk TPS 3 pada bukti fisik. Kemudian, Bukti P-2.DPR RI.65, tidak ada keterangan TPS 6 pada bukti fisik. P-2.DPR RI.68, ini juga TPS 3 tidak ada keterangan di bukti fisik. Kemudian, P-2.DPR RI.73, daftar ... di daftar alat bukti Kelurahan Labuhan Permai, tetapi di bukti fisik Kelurahan Labuhan Mulia. Bukti P-2.DPR RI.81 pada bukti fisik tidak ada

TPS 3. Kemudian, Bukti P-2.RI ... DPR RI.84, bukti TPS 6 tidak terbaca. Kemudian Bukti P-2.DPR RI.97, tidak ada keterangan TPS 2 dan TPS 3 pada bukti fisik. Bukti P-2.DPR RI.113, tidak ada keterangan TPS 5 pada bukti fisik. Kemudian, Bukti D-41 I P.2.DPR RI.116, ini tidak ada bukti fisik untuk TPS 1 dan untuk TPS 2 ... eh, sori TPS 1, sebentar ini, tidak ada bukti fisik TPS 1 dan ada 2 bukti fisik untuk TPS 4. Kemudian Bukti P-2.DPR RI RI.120 daftar alat bukti tertulis *Kelurahan Tanjung Menang*, namun tertulis *Kelurahan Tanjung Menang Raya* di ... di bukti fisiknya. Bukti P-2.DPR RI.121 tertulis Kelurahan Tanjung Menang, namun dibukti fisik tertulis *Kelurahan Tanjung Menang Raya*, ya, *Tanjung Menang Raya*, ya.

Jadi, semua bukti yang dimasukkan, kecuali yang saya sebut tadi masih bermasalah kita sahkan dan yang masih bermasalah nanti dikonfirmasi kembali ke bagian Kepaniteraan.

KETUK PALU 1X

Kemudian, untuk Perkara Nomor 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Demokrat. Dapil Tanggamus IV ini tidak menyerahkan bukti, ya? Karena permohonan baru saja mencabut dalam persidangan. Dicatat nanti, ya, dicabut jam dan tanggalnya, ya. Tanggal 10 Juli 2019, pukul 19.40 WIB itu dicabut.

Kemudian, prepe ... Provinsi Lampung Bukti P-41 sampai dengan P-49 ini sudah diverifikasi dan lengkap, kita sahkan.

KETUK PALU 1X

Informasi selanjutnya adalah informasi tentang penundaan hari sidang. Untuk sidang perkara ini kita lanjutkan pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2019, ya. Ini untuk Provinsi Lampung, khusus Lampung, ya. Jadi yang bukan Lampung tidak termasuk di sini. Waktu ... waktu sidang adalah pukul 10.30 WIB. Kemudian acaranya Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu, Keterangan Pihak Terkait dan Pengesahan Bukti Termohon, Bawaslu dan Pihak Terkait.

Pemberitahuan ini berlaku sebagai panggilan resmi dan Mahkamah tidak akan menyampaikan lagi panggilan tertulis. Jadi, ndak ada lagi alasan tidak hadir karena tidak ada panggilan. Sekali lagi panyampaian ini, sekaligus panggilan resmi untuk mengikuti persidangan pada hari Selasa, 16 Juli 2019, pukul 10.30 WIB.

Kemudian, perbaikan jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu diajukan paling lambat Jumat, 12 Juli 2019, pukul 12.00 WIB, ya. Jelas, ya?

306. BAWASLU: FRITZ EDWARD SIREGAR

Yang Mulia.

307. KETUA: ASWANTO

Ada lagi yang mau cabut?

308. BAWASLU: FRITZ EDWARD SIREGAR

Enggak. Yang Mulia, dari Bawaslu, Yang Mulia.

309. KETUA: ASWANTO

Silakan!

310. BAWASLU: FRITZ EDWARD SIREGAR

Yang Mulia, kalau persidangan tadi, tadi sebelum salat disampaikan bahwa untuk besok tanggal ... Selasa, 16 Juli itu pukul 10.30 WIB itu adalah Banten, sedangkan Lampung itu pukul 13.30 WIB.

311. KETUA: ASWANTO

Ada pergesaran. Nanti, kita panggil ulang.

312. BAWASLU: FRITZ EDWARD SIREGAR

Baik, Yang Mulia.

313. KETUA: ASWANTO

Ini karena ada 2 ... apa namanya ... ngacir, gitu, nanti kita selipkan di situ.

314. BAWASLU: FRITZ EDWARD SIREGAR

Baik, Yang Mulia.

315. KETUA: ASWANTO

Nanti akan ada penyampaian panggilan secara tertulis.

316. BAWASLU: FRITZ EDWARD SIREGAR

Ya, baik, Yang Mulia, terima kasih.

317. KETUA: ASWANTO

Masih ada lagi?

318. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 236-07-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BUDI RAHMAN

Termohon, Yang Mulia.

319. KETUA: ASWANTO

Termohon apa yang mau disampaikan?

320. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 236-07-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BUDI RAHMAN

Ya, ini terhadap ... apa ... Perkara Nomor 236-07-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 di mana tadi Yang Mulia menyatakan gugur karena memang tidak hadir. Apakah kami tetap harus ada penyampaian jawaban?

321. KETUA: ASWANTO

Ya (...)

322. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 236-07-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BUDI RAHMAN

Ini mengingat banyak juga perkara yang kami tangani, Yang Mulia. Mohon izin.

323. KETUA: ASWANTO

Sebenarnya kalau gugur, ya, gugur juga jawaban Bapak. Kalau Bapak mau jawab silakan, tapi nanti kami nyatakan bahwa jawaban KPU juga gugur.

324. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 236-07-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BUDI RAHMAN

Terima kasih, Yang Mulia.

325. KETUA: ASWANTO

Ya, Pak, ya?

326. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 236-07-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BUDI RAHMAN

Ya, Yang Mulia.

327. KETUA: ASWANTO

Jadi yang sudah dinyatakan gugur, tidak perlu direspons lagi. Jelas, Pak, ya?

Baik, dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 19.53 WIB

Jakarta, 10 Juli 2019
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.